

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka teori

2.1.1 Standar Akuntansi Keuangan(SAK)

Di Indonesia, Badan yang berwenang untuk mengesahkan Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba adalah Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 8 April 2011 yang menggantikan PSAK 45(1997) Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. SAK dijadikan sebagai pedoman atau acuan untuk menyusun laporan keuangan agar dapat disajikan dengan aktual, dapat diperbandingkan, tidak menyesatkan dan mudah dipahami.

Menurut *American Accounting Association*(AAA), akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Sementara menurut *American Institute of Certified Public Accountants*(AICPA), akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian yang setidaknya bersifat financial dan penafsiran hasil-hasilnya.

Jadi kesimpulannya akuntansi merupakan suatu proses mengumpulkan, mengklasifikasi, mengukur, mencatat dan melaporkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang dapat memberikan manfaat untuk pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan.

Di Indonesia standar akuntansi berkembang menjadi 4 pilar yang disusun dengan mengikuti perkembangan dunia usaha yaitu :

- 1) PSAK-IFRS

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan-*International Financial Report Standard* (PSAK) adalah nama lain dari SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang diterapkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada Tahun 2012 lalu. Standar ini digunakan untuk badan atau bisnis yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal seperti perusahaan publik, asuransi, perbankan, BUMN, ataupun perusahaan dana pensiun. PSAK sama dengan SAK, sama-sama bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Sedangkan penggunaan IFRS sendiri ditentukan karena Indonesia merupakan anggota IFAC (*International Federation of Accountants*) yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansi mereka.

2) SAK-ETAP

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntansi Publik (SAK-ETAP) digunakan untuk entitas yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. ETAP merupakan hasil penyederhanaan standar akuntansi IFRS yang meliputi tidak adanya laporan laba/rugi komprehensif, penilaian untuk aset tetap, aset tidak berwujud, dan properti investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan, tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi atau nilai wajar, serta tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan karena beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak. Jika diterapkan dengan tepat, unit bisnis kecil dan menengah dapat membuat laporan keuangan tanpa harus dibantu oleh pihak lain dan dapat dilakukan audit terhadap laporannya tersebut.

3) PSAK-Syariah

PSAK-Syariah merupakan pedoman yang dapat digunakan untuk lembaga-lembaga kebijakan syariah seperti bank syariah, pegadaian syariah, badan zakat, dan lain sebagainya. Pengembangan standar akuntansi ini dibuat berdasarkan acuan dari fatwa yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). Standar ini terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah, dan istishna.

4) SAP

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) telah ditetapkan sebagai peraturan pemerintah yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). SAP dibuat untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.

2.1.2 Syarat-syarat Laporan Keuangan Kualitatif

1. Harus sesuai dan relevan

Laporan keuangan yang disusun berdasarkan informasi yang sesuai dengan fakta dan akurat tentang kondisi secara menyeluruh yang berhubungan dengan segala aktivitas operasionalnya.

2. Jelas dan mudah dimengerti

Laporan keuangan yang disusun harus jelas dan mudah dimengerti oleh pihak yang membutuhkan informasi keuangan dari laporan tersebut sehingga bisa memahaminya.

3. Sesuai dengan ukuran dan bisa diuji kebenarannya.

Penyusunan laporan keuangan dapat menggunakan dasar penetapan aturan tertentu yang bisa dijadikan sebagai pengukuran kebenaran laporan keuangan, serta informasi yang disajikan harus bisa dipertanggungjawabkan.

4. Netral dan lengkap.

Informasi yang diberikan harus apa adanya tanpa menghilangkan atau menutup-nutupi informasi dari segi apapun, serta laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan SAK dan harus mempunyai bukti transaksi yang lengkap tanpa rekayasa.

5. Tepat waktu

Laporan keuangan sangat penting dan dibutuhkan dalam kegiatan operasionalnya untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan maka dari itu laporan keuangan harus disajikan dengan tepat waktu.

6. Memiliki daya banding

Informasi dari laporan keuangan yang disajikan harus bisa dijadikan sebagai perbandingan dengan periode-periode sebelumnya agar dapat mengambil keputusan untuk langkah selanjutnya dengan tepat.

2.1.3 PSAK No. 45

1) Tujuan

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba. Dengan adanya pedoman pelaporan, diharapkan pelaporan keuangan entitas nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi.

2) Ruang lingkup

1. Pernyataan ini berlaku bagi laporan keuangan yang disajikan oleh entitas nirlaba yang memenuhi karakteristik sebagai berikut :
 - a. Sumber daya entitas nirlaba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah besar sumber daya yang diberikan.
 - b. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba,

maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas nirlaba tersebut.

- c. Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas nirlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba.
2. Pernyataan ini dapat diterapkan oleh lembaga pemerintah dan unit sejenis lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Laporan keuangan untuk entitas nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berbeda dengan laporan keuangan untuk entitas bisnis pada umumnya.
 4. Pernyataan ini menetapkan informasi dasar tertentu yang disajikan dalam laporan keuangan entitas nirlaba. Pengaturan yang tidak diatur dalam Pernyataan ini mengacu pada SAK atau SAK ETAP untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan.

3) Definisi

Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini :

1. Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi entitas nirlaba diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lain yang berasal dari sumber daya tersebut.
2. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran

kembali yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.

3. Sumber daya terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer.
4. Sumber daya tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali.

2.1.4 Laporan Keuangan Entitas Nirlaba

a. Tujuan laporan keuangan

Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba.

Pihak pengguna laporan keuangan memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai :

1. Jasa yang diberikan oleh entitas nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut.
2. Cara manajer melaksanakan tanggung jawab dan aspek lain dari kinerjanya.

Secara rinci, tujuan laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, adalah untuk menyajikan informasi mengenai :

1. Jumlah dan sifat aset, liabilitas dan aset neto entitas nirlaba;
2. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah nilai dan sifat aset neto;

3. Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antar keduanya;
4. Cara entitas nirlaba mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lain yang berpengaruh terhadap likuiditasnya;
5. Usaha jasa entitas nirlaba.

Setiap laporan keuangan menyediakan informasi yang berbeda, dan informasi dalam laporan keuangan biasanya melengkapi informasi dalam laporan keuangan yang lain.

b. Laporan keuangan entitas nirlaba

Laporan keuangan entitas nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan dan catatan atas laporan keuangan.

a) Laporan posisi keuangan

1. Tujuan laporan posisi keuangan

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas dan aset neto serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan, dan informasi dalam laporan keuangan lain dapat membantu pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak lain untuk menilai :

- ❖ Kemampuan entitas nirlaba untuk memberikan jasa secara berkelanjutan, dan
- ❖ Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Laporan posisi keuangan mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas dan aset neto.

2. Klasifikasi aset dan liabilitas

Laporan posisi keuangan termasuk catatan atas laporan, menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aset dan liabilitas. Informasi tersebut umumnya disajikan dengan pengumpulan aset dan liabilitas yang memiliki karakteristik serupa dalam suatu kelompok yang relatif homogen. Sebagai contoh, entitas nirlaba biasanya melaporkan masing-masing unsur aset dalam kelompok yang homogen, seperti :

- ❖ Kas dan setara kas;
- ❖ Piutang pasien, pelajar, anggota dan penerima jasa yang lain;
- ❖ Persediaan;
- ❖ Sewa, asuransi, dan jasa lain yang dibayar dimuka;
- ❖ Instrumen keuangan dan investasi jangka panjang;
- ❖ Tanah, gedung, peralatan, serta aset tetap lain yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa.

Kas atau aset lain yang dibatasi penggunaannya oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali disajikan terpisah dari kas atau aset lain yang tidak terikat penggunaannya.

Informasi likuiditas diberikan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas, dan liabilitas berdasarkan tanggal jatuh tempo;

- b. Mengelompokkan aset ke dalam kelompok lancar dan tidak lancar, dan liabilitas ke dalam kelompok jangka pendek dan jangka panjang;
 - c. Mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aset atau saat jatuh tempo liabilitas, termasuk pembatasan penggunaan aset, dalam catatan atas laporan keuangan.
3. Klasifikasi aset neto terikat atau tidak terikat

Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan pada ada atau tidaknya pembatasan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, yaitu : terikat secara permanen, terikat secara temporer dan tidak terikat.

Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan permanen terhadap aset, seperti tanah atau karya seni, yang diberikan untuk tujuan tertentu, untuk dirawat dan tidak untuk dijual; atau aset yang diberikan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset neto yang penggunaannya dibatasi secara permanen atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan permanen kelompok kedua tersebut berasal dari hibah atau wakaf dan warisan yang menjadi dana abadi.

Pembatasan temporer terhadap sumber daya berupa aktivitas operasi tertentu; investasi untuk jangka waktu tertentu; penggunaan selama periode tertentu di masa depan;

atau pemerolehan aset tetap; dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset neto yang penggunaannya dibatasi secara temporer atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan temporer oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali dapat berbentuk pembatasan waktu atau pembatasan penggunaan, atau keduanya.

Aset neto tidak terikat umumnya meliputi pendapatan dari jasa, penjualan barang, sumbangan dan dividen atau hasil investasi, dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut. Batasan terhadap penggunaan aset neto tidak terikat dapat berasal dari sifat entitas nirlaba. Informasi mengenai batasan tersebut umumnya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

b) Laporan aktivitas

1. Tujuan laporan aktivitas

Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto; hubungan antar transaksi dan peristiwa lain; dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak lain untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode; menilai upaya kemampuan dan kesinambungan entitas nirlaba dan memberikan jasa; dan menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.

Laporan aktivitas mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aset neto selama suatu periode. Perubahan aset neto dalam laporan aktivitas tercermin pada aset neto atau ekuitas dalam posisi keuangan.

2. Perubahan kelompok aset neto

Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aset neto terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode. Pendapatan dan keuntungan yang menambah aset neto serta beban dan kerugian yang mengurangi aset neto.

3. Klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian

Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, dan menyajikan beban sebagai pengurang aset neto tidak terikat.

Sumber daya disajikan sebagai penambah aset neto tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, bergantung pada ada tidaknya pembatasan. Dalam hal sumber daya terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat disajikan sebagai sumber daya tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi.

Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aset lain (atau liabilitas) sebagai penambah atau pengurang aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.

Klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian dalam kelompok aset neto tidak menutup peluang adanya klasifikasi tambahan dalam laporan aktivitas. Misalnya dalam

suatu kelompok atau beberapa kelompok perubahan dalam aset neto, entitas nirlaba dapat mengklasifikasikan unsur-unsurnya menurut kelompok operasi atau non operasi, dapat dibelanjakan atau tidak dapat dibelanjakan, telah direalisasi atau belum direalisasi, berulang atau tidak berulang, atau dengan cara lain.

Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto, kecuali diatur berbeda oleh SAK atau SAK ETAP. Laporan aktivitas menyajikan jumlah neto keuntungan dan kerugian yang berasal dari transaksi insidental atau peristiwa lain yang berada diluar pengendalian entitas nirlaba dan manajemen. Misalnya, keuntungan atau kerugian penjualan tanah dan gedung yang tidak digunakan lagi.

4. Informasi pemberian jasa

Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung.

Klasifikasi secara fungsional bermanfaat untuk membantu pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak lain dalam menilai pemberian jasa dan penggunaan sumber daya. Di samping penyajian klasifikasi beban secara fungsional, entitas nirlaba dianjurkan untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya. Misalnya, gaji, sewa, listrik, bunga, dan penyusutan.

Program pemberian jasa merupakan aktivitas untuk menyediakan barang dan jasa kepada penerima manfaat, pelanggan atau anggota dalam rangka mencapai tujuan atau misi

entitas nirlaba. Pemberian jasa tersebut merupakan tujuan dan hasil utama yang dilaksanakan melalui berbagai program utama.

Aktivitas pendukung meliputi semua aktivitas selain program pemberian jasa. Umumnya, aktivitas pendukung meliputi aktivitas manajemen dan umum, pencairan dana, dan pengembangan anggota. Aktivitas manajemen dan umum meliputi pengawasan, manajemen bisnis, pembukuan, penganggaran, pendanaan, dan aktivitas administratif lain, serta semua aktivitas manajemen dan administrasi kecuali program pemberian jasa atau pencairan dana. Aktivitas pencairan dana meliputi publikasi dan kampanye pencairan dana; pengadaan daftar alamat pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali; pelaksanaan acara khusus pencairan dana; pembuatan dan penyebaran manual, petunjuk dan bahan lain; dan pelaksanaan aktivitas lain dalam rangka pencairan dana dari individu, yayasan, pemerintah dan lain-lain. Aktivitas pengembangan anggota meliputi pencairan anggota baru dan pengumpulan iuran anggota, hubungan dan aktivitas sejenis.

c) Laporan arus kas

1. Tujuan laporan arus kas

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode.

2. Klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas

Penyajian arus kas masuk dan keluar harus digolongkan ke dalam tiga kategori yaitu :

a. Aktivitas operasi

Aktivitas operasi meliputi siklus kegiatan jangka pendek yang merupakan aktivitas penghasil utama pendapatan

perusahaan. Semua transaksi yang berkaitan dengan laba yang dilaporkan dalam laporan rugi/laba.

b. Aktivitas investasi

Termasuk dalam perkiraan ini adalah semua penerimaan dan pengeluaran uang kas yang terkait dengan investasi lembaga. Investasi dapat berupa pembelian/penjualan aktiva tetap, penempatan/pencairan dana deposito atau investasi lain. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah :

- ❖ Pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri
- ❖ Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan serta aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lain.

c. Aktivitas pendanaan

Termasuk dalam kelompok ini adalah perkiraan yang terkait dengan transaksi berupa penciptaan atau pelunasan kewajiban hutang lembaga dan kenaikan/penurunan aktiva bersih dari surplus-defisit lembaga.

- ❖ Penerimaan kas dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali yang penggunaannya dibatasi dalam jangka panjang.
- ❖ Penerimaan kas dari pemberi sumber daya dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan, dan pemeliharaan aset tetap, atau peningkatan dana abadi.

❖ Bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya dalam jangka panjang.

d. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non kas, misalnya sumbangan berupa bangunan atau aset investasi.

d) Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan laporan-laporan diatas karena bertujuan untuk memberikan informasi tentang kebijakan akuntansi dan informasi tambahan tentang perkiraan-perkiraan yang disajikan dalam laporan keuangan.

2.1.5 Organisasi nirlaba

a. Pengertian Organisasi Nirlaba

Organisasi non profit atau organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba(moneter). Organisasi nirlaba meliputi keagamaan, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal-hal perundang-undangan, organisasi sukarelawan, serikat buruh.

Nickels, dkk (2009) menyatakan bahwa suatu organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang tujuan-tujuannya tidak mencakup penciptaan laba pribadi bagi pemilik atau pengelolanya, organisasi nirlaba sering kali berusaha mencapai keuntungan finansial, tetapi keuntungan-keuntungannya tersebut digunakan untuk mencapai tujuan sosial atau pendidikan dari organisasi dan bukannya untuk kepentingan pribadi.

Menurut PSAK No. 45 bahwa organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut (IAI, 2004:45.1)

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu lembaga atau organisasi yang didirikan dengan tidak mengutamakan profit atas segala aktivitas operasionalnya melainkan untuk mencapai tujuan sosial dari organisasi tersebut. Pada umumnya, sumber daya atau dana yang dipakai untuk menjalankan segala kegiatan yang akan dilakukan berasal dari donatur atau sumbangan dari orang-orang yang ingin membantu sesamanya khususnya orang yang tidak mampu dalam bidang ekonomi.

b. Karakteristik entitas nirlaba

Karakteristik entitas nirlaba berbeda dengan entitas bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara entitas nirlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam entitas nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam entitas bisnis, contohnya penerimaan sumbangan. Namun demikian, dalam praktik entitas nirlaba sering tampil dalam berbagai bentuk, sehingga sering kali sulit dibedakan dengan entitas bisnis pada umumnya.

Pada beberapa bentuk entitas nirlaba, meskipun tidak ada kepemilikan, entitas nirlaba tersebut mendanai kebutuhan modalnya dari utang dan kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya, pengukuran jumlah, saat, dan kepastian arus kas masuk menjadi ukuran kinerja penting bagi pengguna laporan keuangan, seperti

kreditur dan pemasok dana lain. Entitas tersebut memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan entitas bisnis pada umumnya.

c. Perbedaan organisasi nirlaba dan organisasi laba

Ada beberapa hal yang dapat dibedakan antara organisasi nirlaba dan organisasi laba. Dalam hal kepemilikan, tidak jelas siapa sesungguhnya pemilik organisasi nirlaba, apakah anggota, klien atau donatur. Pada organisasi laba, pemilik jelas memperoleh untung dari hasil usaha organisasinya. Dalam hal donatur, organisasi nirlaba membutuhkannya sebagai sumber pendanaan. Berbeda dengan organisasi laba yang telah memiliki sumber pendanaan yang jelas yakni dari keuntungan usahanya. Dalam hal penyebaran tanggung jawab, pada organisasi laba telah jelas siapa yang menjadi Dewan Komisaris, yang kemudian memilih seorang Direktur Pelaksana.

Pada organisasi nirlaba, hal ini tidak mudah dilakukan. Anggota Dewan Komisaris bukanlah pemilik organisasi.

Perbedaan karakteristik organisasi nirlaba dan organisasi laba yaitu : organisasi nirlaba menerima kontribusi sumber dana dalam jumlah signifikan dari pemberi dana yang tidak mengharapkan pengembalian sedangkan pada organisasi laba pemberi dana adalah pemilik atau kreditor yang mempunyai kepentingan untuk memiliki atau pengembalian tambah keuntungan atau bunga. Organisasi nirlaba beroperasi untuk menghasilkan barang dan jasa yang bukan untuk mencari laba sedangkan organisasi laba menghasilkan barang dan jasa untuk menghasilkan laba. Dalam organisasi nirlaba pemberi dana tidak mempunyai kepentingan terhadap organisasi, sedangkan dalam organisasi laba pemberi dana mempunyai kepentingan untuk memiliki atau pengembalian dana.

Pengelolaan organisasi nirlaba dan kriteria-kriteria pencapaian kinerja organisasi tidak berdasar pada pertimbangan ekonomi semata, sejauh mana masyarakat yang dilayaninya diberdayakan sesuai konteks hidup dan

potensi-potensi kemanusiannya. Sifat sosial dan kemanusiaan sejati merupakan ciri khas pelayanan organisasi-organisasi nirlaba. Manusia menjadi pusat dan sekaligus agen perubahan dan pembaharuan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan kesejahteraan, kesetaraan gender, keadilan, kedamaian, bebas dari konflik dan kekerasan.

2.1.6 Gereja

Kata “gereja” yang dalam bahasa Inggrisnya “*church*” diambil dari bahasa Yunani “EKKLESIA” yang berarti “dipanggil keluar.” Kata ekklesia merupakan gabungan dari kata depan “ek” yang berarti keluar (out) dan kata kerja “kaleo” (klesia) yang berarti dipanggil (*called*). Secara khusus kata ini digunakan untuk menggambarkan kelompok orang yang dipanggil keluar untuk tujuan yang khusus dan pasti.

Dalam Perjanjian Baru, kita menemukan bahwa gereja itu adalah orang yang dipanggil keluar dari dunia (Kolose 1:13; 2 Korintus 6:17,18).

Tujuan khusus dari gereja itu adalah untuk memuliakan Bapa yang di surga.

Dalam Alkitab kata “gereja” digunakan dalam tiga cara:

1. Secara universal

Matius 16:18, ketika menjanjikan ini Yesus tidak secara lokal/khusus baik dalam tempat ataupun waktu. Dia berjanji untuk membangun gereja yang universal yang akan menjangkau semua bangsa, etnik, ras, kultur yang beraneka ragam, dan pada semua situasi.

2. Secara lokal(jemaat lokal)

Yaitu suatu perkumpulan/kelompok orang yang bertemu dalam sebuah tempat/lokasi secara khusus. Dalam beberapa tulisan Paulus dalam Perjanjian Baru adalah merupakan surat kiriman kepada beberapa jemaat lokal. Contohnya antara lain: jemaat yang ada di Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika. Berea, Tiatira, dll.

3. Sebagai sebuah perhimpunan/perkumpulan

Dalam hal ini adalah perhimpunan dari individu-individu untuk suatu tujuan. Contohnya adalah 1 Korintus 11:18

Aritonang dan De Jonge (2009 : 6) mendefinisikan gereja adalah persekutuan semua orang percaya, bahwa Allah dalam Yesus Kristus telah mengubah sejarah dunia dengan cara yang menentukan seluruh masa depan.

Fransiskus (2011) mendefinisikan pada aspek spiritual, akuntabilitas juga mempunyai makna bahwa individu atau organisasi mempunyai kesadaran untuk menyatakan akuntabilitas kepada yang sifatnya transenden yaitu Allah. Dalam Website Wikipedia (2018) Gereja adalah suatu perkumpulan lembaga penganut iman kristiani.

Jadi kesimpulan bahwa istilah “Gereja” dipakai untuk menggambarkan gereja yang universal, lokal, perhimpunan peribadatan.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan laporan keuangan entitas nirlaba yaitu :

1. Vini Haryono (2019) judul Evaluasi Penerapan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba pada Jemaat GMIM Sion Teling Sentrum Manado. Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba pada jemaat GMIM Sion Teling Sentrum Manado. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian yaitu belum menerapkan PSAK No. 45 pada penyajian laporan keuangan.
2. Andi Marlinah dan Ali Ibrahim (2017) judul Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45 Studi Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf. Tujuan penelitian untuk mengetahui laporan keuangan masjid sesuai dengan PSAK No. 45 ataukah belum. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pencatatan administrasi keuangan dibedakan menjadi 2 yaitu penerimaan dan pengeluaran.

3. Angelia N. M. Tinungki dan Rudi J. Pusung (2014) judul Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45 Pada Panti Sosial Tresna Werdha Hana. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apakah penerapan pelaporan keuangan pada Panti Sosial telah sesuai dengan yang tercantum. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif Hasil penelitian yaitu belum sepenuhnya menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan no. 45

2.3 Kerangka Berpikir

Langkah-langkah pemecahan masalah yang akan dibahas peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Mengklasifikasi laporan keuangan gereja
2. Menguraikan dan menjelaskan bentuk laporan keuangan gereja
3. Melakukan perbaikan atas laporan keuangan gereja berdasarkan PSAK No. 45 disaat belum sesuai dengan PSAK 45
4. Laporan keuangan Gereja setelah menerapkan PSAK 45
5. Kesimpulan

Agar dapat dipahami dan jelas maka kerangka berpikir digambarkan sebagai berikut

Gambar 2.3.1

